e-ISSN 2829-7652
Volume 3, Nomor 2 Tahun 2024
Hlm. 222-236

https://jurnal.astinamandiri.com/index.php/juria

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Susilawati[1], Yunita Fourina Dewi[2]
Universitas Nurtanio Bandung, Indonesia
susilawati@unnur.ac.id, yunitadewi@unnur.ac.id

Abstrak

Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan instrumen fiskal strategis pemerintah Indonesia untuk mendorong kemandirian desa serta mengatasi ketimpangan pembangunan ekonomi regional. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dampak implementasi kebijakan ADD terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pendekatan studi kasus deskriptif digunakan untuk mengeksplorasi realitas di lapangan secara komprehensif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha mikro, serta dilengkapi dengan observasi partisipatif dan dokumentasi laporan realisasi anggaran. Teknik analisis data menerapkan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADD memberikan dampak positif yang signifikan melalui pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan usaha tani dan sarana air bersih, yang secara langsung memotong biaya logistik dan memperlancar mobilitas ekonomi warga. Selain itu, stimulasi permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbukti mampu menghidupkan sektor UMKM lokal. Peningkatan konektivitas dan aktivitas ekonomi ini berimplikasi langsung pada perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta perbaikan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini masih dihadapkan pada tantangan klasik, yaitu keterbatasan kapasitas manajerial sumber daya manusia dalam perencanaan anggaran serta adanya tendensi regulasi yang terlalu birokratis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ADD berhasil mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap, namun optimalisasinya memerlukan pendampingan kapasitas tata kelola secara berkelanjutan dan simplifikasi birokrasi pelaporan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

The Village Fund Allocation (ADD) policy is a strategic fiscal instrument of the Indonesian government to promote village independence and address regional economic development disparities. This qualitative research aims to analyze in depth the impact of ADD policy implementation on accelerating economic growth and improving the welfare of rural communities. A descriptive case study approach was used to comprehensively explore the realities on the ground. Data were collected through in-depth interviews with village officials, community leaders, and micro-entrepreneurs, supplemented by participant observation and

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

documentation of budget realization reports. Data analysis techniques applied an interactive model that included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that ADD has a significant positive impact through the development of basic infrastructure, such as farm roads and clean water facilities, which directly reduce logistics costs and facilitate economic mobility for residents. Furthermore, capital stimulation through Village-Owned Enterprises (BUMDes) has proven effective in revitalizing the local MSME sector. This increased connectivity and economic activity has direct implications for expanding employment opportunities, increasing household incomes, and improving access to health and education facilities. However, the effectiveness of this policy still faces classic challenges, namely limited human resource managerial capacity in budget planning and a tendency toward overly bureaucratic regulations. This study concludes that Village Fund Allocation (ADD) has been successful in accelerating local economic growth and gradually improving community welfare. However, its optimization requires ongoing capacity building and streamlining of reporting bureaucracy.
Keywords: Village Fund Allocation, Economic Growth, Community Welfare

PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan paradigma yang sangat signifikan dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya hingga tingkat administrasi terkecil yaitu desa. Landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengakuan kedaulatan serta kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengurus tata pamong dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat lokal. Melalui regulasi ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang pasif melainkan sebagai subjek atau motor utama pembangunan nasional yang aktif. Konsekuensi logis dari pelimpahan wewenang ini adalah kewajiban pemerintah pusat untuk menyalurkan instrumen fiskal pendukung, salah satunya berbentuk Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Anggaran tersebut didistribusikan dengan tujuan mendasar untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sesuai dengan teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi publik, penyerahan wewenang anggaran kepada tingkat lokal diasumsikan akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah desa dianggap lebih memahami preferensi, kebutuhan riil, serta karakteristik hambatan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat setempat secara presisi dibandingkan pemerintah pusat.

Akselerasi pembangunan di wilayah perdesaan merupakan agenda krusial bagi perekonomian nasional mengingat sebagian besar kantong kemiskinan dan ketimpangan struktural masih berpusat di wilayah pedalaman. Secara teoretis, pertumbuhan ekonomi wilayah perdesaan dapat dipicu melalui penyediaan barang publik yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Kebijakan Alokasi Dana Desa dirancang untuk memenuhi kebutuhan barang publik tersebut dengan memberikan fleksibilitas anggaran kepada aparatur desa agar dapat mengintervensi sektor-sektor prioritas yang selama ini terabaikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryahadi (2019), investasi pada tingkat pedesaan memiliki dampak pengganda yang jauh lebih

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

besar terhadap pengurangan angka kemiskinan makro jika dibandingkan dengan investasi yang terpusat di wilayah perkotaan yang padat modal. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi desa didominasi oleh sektor pertanian dan usaha mikro yang bersifat padat karya, sehingga setiap stimulus modal yang masuk akan langsung berputar dalam ekosistem domestik desa dan menciptakan lapangan pekerjaan instan bagi angkatan kerja lokal. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan anggaran desa memegang peranan penentu dalam keberhasilan transformasi ekonomi nasional secara keseluruhan.

Namun demikian, pergeseran orientasi pembangunan dari model sentralistik menjadi desentralistik ini memunculkan kompleksitas baru dalam tataran implementasi empiris. Banyak pengamat menilai bahwa kesiapan tata kelola kelembagaan di tingkat desa belum sepenuhnya mampu mengimbangi besarnya arus modal yang mengalir masuk setiap tahunnya. Kesenjangan kompetensi manajerial antara harapan regulasi dengan realitas kapasitas aparatur desa memicu terjadinya distorsi alokasi anggaran, di mana pemanfaatan dana seringkali hanya didominasi oleh proyek fisik yang bersifat kosmetik tanpa perencanaan strategis jangka panjang yang berorientasi pada produktivitas ekonomi warga. Masalah ini diperparah oleh masih rendahnya partisipasi aktif warga dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, sehingga prioritas anggaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa seringkali merupakan representasi dari kepentingan elite desa semata ketimbang kebutuhan riil kelompok marjinal. Fenomena kerentanan tata kelola ini berpotensi mengubah instrumen yang seharusnya menjadi solusi kesejahteraan justru menjelma menjadi sumber konflik baru dan memicu inefisiensi anggaran yang masif di tingkat akar rumput.

Berdasarkan pengamatan empiris pada berbagai wilayah di Indonesia, pola alokasi penggunaan anggaran desa menunjukkan kecenderungan yang sangat timpang antara sektor infrastruktur fisik dengan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kapasitas kelembagaan lokal. Fenomena ketidakseimbangan orientasi penganggaran ini secara visual dapat dicermati melalui tren alokasi belanja yang tersaji secara ringkas pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Estimasi Rata-Rata Proporsi Alokasi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Sektor Prioritas Nasional

No.	Sektor Pemanfaatan Dana	Persentase Alokasi (%)	Fokus Utama Kegiatan
1	Pembangunan Infrastruktur Fisik	65% - 70%	Jalan desa, jembatan, irigasi, gedung kantor
2	Penyelenggaraan Pemerintahan	15% - 20%	Siltap perangkat, operasional

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

No.	Sektor Pemanfaatan Dana	Persentase Alokasi (%)	Fokus Utama Kegiatan
			BPD, administrasi
3	Pembinaan Kemasyarakatan	5% - 10%	Kegiatan keagamaan, kepemudaan, posyandu
4	Pemberdayaan Ekonomi & BUMDes	5% - 8%	Pelatihan keterampilan, modal usaha mikro

Sumber: Data Diolah Berdasarkan Sintesis Laporan Kementerian Desa dan Hasil Riset Lapangan Terdahulu (2025)

Data yang tersaji dalam Tabel 1 dengan sangat jelas memperlihatkan adanya dominasi mutlak pada sektor pembangunan infrastruktur fisik yang menyerap hampir sebagian besar porsi anggaran desa, sementara sektor pemberdayaan ekonomi dan permodalan lembaga usaha kolektif seperti Badan Usaha Milik Desa justru menempati porsi alokasi yang paling marginal dan memprihatinkan. Ketimpangan alokasi ini membawa konsekuensi serius terhadap lambatnya pencapaian target kesejahteraan non-fisik masyarakat desa. Kajian mendalam yang dirilis oleh Lewis (2021) mengonfirmasi bahwa penekanan pembangunan yang melulu berfokus pada aspek semenisasi jalan dan pembangunan fisik tanpa diimbangi oleh penguatan kapasitas modal produktif masyarakat akan memicu terjadinya jebakan pertumbuhan semu di tingkat desa. Infrastruktur yang megah memang memberikan dampak visual instan yang disukai oleh para pengambil kebijakan lokal untuk laporan administratif, tetapi gagal dalam menciptakan ketahanan ekonomi rumah tangga yang berkelanjutan karena tidak ada transformasi pada struktur pendapatan masyarakat miskin secara riil. Kondisi inilah yang melatarbelakangi mengapa pertumbuhan ekonomi tingkat desa seringkali bergerak lambat dan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan volume transfer anggaran yang diterima dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, perspektif teoretis mengenai hubungan desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan anggaran tidak boleh hanya diukur dari penyerapan dana secara kuantitatif, melainkan dari sejauh mana kualitas hidup masyarakat mengalami perbaikan yang hakiki. Kesejahteraan masyarakat dalam arti luas mencakup peningkatan pendapatan riil, ketercukupan pangan, pemenuhan papan, serta kemudahan dalam mengakses layanan pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan dasar yang layak. Penelitian yang dipublikasikan oleh Yusuf (2020) mengemukakan argumen bahwa efektivitas dana desa dalam mendongkrak indeks kesejahteraan sangat ditentukan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

oleh tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan akuntabel di tingkat birokrasi paling bawah. Jika proses perencanaan dan eksekusi anggaran dilingkupi oleh praktik oligarki lokal atau kebocoran anggaran akibat korupsi skala kecil, maka dana sebesar apapun tidak akan mampu menggeser indikator kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, variabel kelembagaan desa bertindak sebagai variabel mediasi yang sangat krusial dalam menghubungkan instrumen kebijakan fiskal dengan output capaian pembangunan kesejahteraan kemasyarakatan.

Tantangan tata kelola dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat perdesaan merupakan isu mendasar yang terus membayangi implementasi kebijakan dana desa sejak awal digulirkan hingga saat ini. Kelemahan administrasi dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban seringkali membuat aparatur desa terjebak dalam masalah hukum yang kontraproduktif bagi kelangsungan pembangunan desa itu sendiri. Studi mendalam oleh Prasetyo (2018) menyoroti bahwa banyak aparatur desa yang mengalami gagap regulasi akibat dinamika peraturan teknis dari kementerian terkait yang berubah terlalu cepat setiap tahunnya tanpa disertai dengan pendampingan teknis yang intensif dan merata. Situasi psikologis yang penuh ketakutan akan sanksi hukum ini membuat para kepala desa cenderung mengambil pilihan aman dalam membelanjakan dana desa, yaitu dengan mereplikasi program-program fisik standar yang mudah dihitung volumenya ketimbang merancang inovasi program pemberdayaan ekonomi yang dinamis namun memiliki risiko pertanggungjawaban administratif yang rumit dan rentan dipersalahkan oleh auditor eksternal.

Lebih lanjut, keterlibatan aktif dan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan anggaran desa merupakan elemen prasyarat mutlak yang tidak boleh diabaikan demi terciptanya akuntabilitas publik. Tanpa kontrol sosial yang kuat dari warga negara di tingkat lokal, potensi penyelewengan dan asimetri informasi antara perangkat desa dan masyarakat akan semakin melebar. Kajian teoretis dari Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya bersifat vertikal kepada instansi pemerintah yang lebih tinggi, melainkan harus bersifat horizontal kepada masyarakat luas selaku pemilik mandat kedaulatan anggaran yang sesungguhnya. Bentuk akuntabilitas horizontal ini dapat diwujudkan melalui transparansi pemasangan papan informasi anggaran di ruang publik desa, kemudahan akses dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi warga, serta pembukaan ruang dialog kritis yang konstruktif dalam setiap evaluasi berkala pelaksanaan pembangunan desa. Ketika saluran akuntabilitas horizontal ini tersumbat, ketidakpercayaan publik akan meningkat dan legitimasi pemerintahan desa akan melemah secara drastis.

Dampak dari pembangunan ekonomi perdesaan yang inklusif juga memiliki korelasi sosiologis yang sangat kuat terhadap penurunan laju migrasi penduduk usia produktif dari desa ke kota-kota besar yang padat. Ketiadaan lapangan kerja yang layak dan minimnya fasilitas penunjang kehidupan yang memadai di desa memaksa para pemuda desa untuk merantau ke wilayah perkotaan guna mencari penghidupan, yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya fenomena penuaan demografi di pedesaan di mana desa hanya dihuni oleh kelompok usia lanjut dan anak-anak yang kurang produktif. Analisis yang dipaparkan oleh Todaro (2020)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

dalam teori migrasi menegaskan bahwa arus perpindahan penduduk pedesaan menuju perkotaan akan terus mengalir secara masif selama terdapat ekspektasi perbedaan pendapatan yang mencolok antarwilayah tersebut. Kebijakan Alokasi Dana Desa yang tepat sasaran melalui pengaktifan unit-unit usaha desa dan hilirisasi produk pertanian lokal diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat lokal, sehingga dapat menahan laju urbanisasi ekstrim dan menjaga keseimbangan demografi ketenagakerjaan nasional demi tercapainya ketahanan ekonomi wilayah yang kokoh.

Jika ditinjau dari aspek metodologi riset ekonomi pembangunan, sebagian besar studi terdahulu yang mengkaji efektivitas dana desa cenderung didominasi oleh metode kuantitatif yang menitikberatkan analisisnya pada penggunaan data sekunder makro, seperti angka produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, atau statistik kemiskinan yang dirilis secara berkala oleh Badan Pusat Statistik. Penelitian kuantitatif dengan model regresi ekonometrika memang sangat valid untuk melihat tren hubungan kausalitas antarvariabel secara makro, namun seringkali gagal menangkap dinamika sosial yang kompleks, resistensi budaya lokal, negosiasi kepentingan elite, serta dinamika proses pengambilan keputusan di tingkat mikro yang sesungguhnya terjadi di balik angka-angka statistik tersebut. Penelitian yang dipelopori oleh Creswell (2018) memberikan penegasan bahwa metode kualitatif memiliki keunggulan inheren dalam membedah fenomena kebijakan publik secara holistik karena mampu menggali makna, persepsi, dan pengalaman langsung para aktor kebijakan di lapangan secara mendalam. Kebutuhan akan kedalaman pemahaman kontekstual inilah yang menjadi pembeda utama dan celah riset yang coba diisi oleh penelitian ini.

Keterbatasan penelitian kuantitatif makro tersebut semakin menegaskan pentingnya kehadiran studi kualitatif mendalam untuk mengonfirmasi validitas implementasi kebijakan di tingkat akar rumput secara riil. Sebagai contoh, angka penyerapan dana desa yang mencapai persentase sempurna mendekati seratus persen dalam laporan administratif dinas terkait belum tentu mencerminkan kualitas pemanfaatan dana yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi kemasyarakatan. Riset kualitatif mampu membongkar apakah proyek yang dilaporkan selesai tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata fungsional bagi peningkatan pendapatan petani setempat atau justru mangkrak menjadi bangunan tak berguna akibat salah perencanaan sejak awal. Tulisan kritis dari Sugiyono (2019) menguraikan bahwa dalam analisis kebijakan publik, data kualitatif berfungsi sebagai instrumen konfirmasi yang sangat kuat untuk menguji apakah substansi filosofis dari suatu kebijakan regulasi telah berjalan beriringan dengan realitas sosiologis di masyarakat, ataukah hanya sekadar menjadi formalitas pemenuhan kewajiban administratif demi menghindari sanksi birokrasi di atas kertas.

Selain isu kapasitas administrasi dan metodologi penelitian, aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekologi dalam pemanfaatan anggaran desa juga mulai menyita perhatian serius dari kalangan akademisi pembangunan global dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur desa yang masif tanpa mengindahkan aspek daya dukung lingkungan lokal seringkali memicu kerusakan ekosistem yang parah, seperti terjadinya erosi tanah akibat konversi lahan, pendangkalan saluran sungai akibat pembuangan material proyek yang tidak teratur,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

serta hilangnya kawasan resapan air yang krusial bagi pertanian berkelanjutan. Konsep pembangunan desa mandiri modern harus mampu mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian ekologis secara harmonis dan seimbang. Kebijakan alokasi anggaran desa ke depan dituntut untuk mengadopsi prinsip penganggaran hijau (*green budgeting*) yang memberikan prioritas khusus pada konservasi alam, pengelolaan sampah terpadu tingkat desa, pemanfaatan energi baru terbarukan skala lokal, serta perlindungan sumber-sumber mata air guna menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi masa depan desa.

Integrasi yang harmonis antara modal sosial, kearifan lokal, dan modernisasi sistem tata kelola keuangan merupakan kunci utama bagi terwujudnya kemandirian desa yang sejati dan berkelanjutan. Desa di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat unik berupa ikatan gotong royong yang kuat, nilai-nilai religiusitas yang kental, serta kepatuhan yang tinggi terhadap norma-norma adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Modal sosial yang berharga ini harus mampu dioptimalisasikan oleh aparatur desa sebagai penggerak partisipasi warga dalam mengawal setiap rupiah dari Alokasi Dana Desa agar terhindar dari moral hazard dan penyalahgunaan wewenang. Ketika nilai-nilai modernitas tata kelola publik seperti transparansi digital dan akuntabilitas keuangan dapat bersanding serasi dengan kearifan lokal tanpa mencabut akar budaya setempat, maka akselerasi pembangunan ekonomi yang inklusif akan tercipta dengan sendirinya, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh warga desa bukan lagi sekadar utopia dalam teks jargon politik melainkan sebuah kenyataan sosiologis yang hidup dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa secara merata.

Melalui pijakan argumen teoretis dan pemaparan realitas empiris yang komprehensif tersebut, penelitian dengan judul Analisis Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat ini mendesak dan sangat penting untuk dilaksanakan secara mendalam. Penelitian ini memfokuskan analisis kualitatifnya pada eksplorasi rantai kausalitas mikro mengenai bagaimana perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan Alokasi Dana Desa berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian domestik sekaligus menggeser indikator kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Kebaruan ilmiah dari studi ini terletak pada upaya mensinergikan teori desentralisasi fiskal dengan realitas sosiologis kelembagaan desa melalui kacamata kualitatif, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya tajam secara akademis tetapi juga aplikatif dan membumi bagi para pemangku kepentingan dalam menyempurnakan formulasi regulasi pengelolaan keuangan desa di masa yang akan datang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengeksplorasi secara mendalam rantai kausalitas mikro dari implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa. Penentuan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada kebutuhan mendasar untuk memahami fenomena sosial dan manajerial yang kompleks di tingkat pemerintahan desa, yang tidak dapat direduksi hanya ke dalam angka-angka statistik makro. Sesuai dengan landasan teoretis yang dikemukakan oleh Creswell (2018), desain penelitian kualitatif berfungsi sebagai

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

instrumen holistik yang sangat efektif dalam menggali makna, persepsi, motivasi, serta interaksi dinamis antaraktor kebijakan publik langsung di lingkungan alamiah mereka. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja dengan mempertimbangkan karakteristik keragaman tingkat kemandirian fiskal desa serta kompleksitas pengelolaan anggaran daerah. Subjek penelitian atau informan kunci ditentukan melalui teknik *non-probability sampling*, yaitu *purposive sampling*, yang mengarah pada individu-individu yang dinilai memiliki kompetensi, otoritas, dan pemahaman mendalam terkait objek kajian, seperti kepala desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok usaha mikro yang terdampak langsung oleh program intervensi fiskal tersebut.

Prosedur pengumpulan data primer dilakukan secara integratif melalui wawancara mendalam yang semi-terstruktur guna memberikan ruang fleksibilitas eksplorasi tanpa kehilangan arah fokus penelitian, serta didukung oleh observasi partisipatif lapangan guna memvalidasi fungsionalitas fisik infrastruktur yang telah dibangun. Untuk menjaga validitas naskah dari subjektivitas peneliti, data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang mencakup regulasi teknis, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta dokumen perencanaan jangka menengah desa. Seluruh data yang terkumpul kemudian diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk memastikan konsistensi informasi dari berbagai sudut pandang berbeda. Proses pengolahan naskah dan analisis data menerapkan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014), yang membagi tahapan analisis ke dalam tiga alur kegiatan simultan yaitu proses reduksi data untuk menyaring informasi esensial, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi akhir. Melalui operasionalisasi tahapan metodologis yang ketat dan sistematis ini, hasil riset diharapkan mampu menyajikan temuan empiris yang objektif, kredibel, serta memiliki akurasi akademik yang tinggi.

HASIL PENELITIAN

Fokus utama temuan diarahkan untuk membedah bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa memengaruhi instrumen pertumbuhan ekonomi sektoral sekaligus pergeseran indikator kualitas hidup atau kesejahteraan riil masyarakat lokal. Berdasarkan hasil pelacakan dokumen dan konfirmasi lapangan, realisasi anggaran di lokasi penelitian menunjukkan komitmen penyerapan kuantitatif yang sangat tinggi, yang secara umum berkisar antara sembilan puluh lima hingga seratus persen dari total pagu transfer fiskal yang diterima setiap tahun anggaran. Tingginya angka penyerapan ini secara administratif mencerminkan kepatuhan yang luar biasa terhadap target birokrasi, namun pengujian kualitatif membongkar adanya dinamika pemanfaatan yang timpang dan pola pengulangan program yang minim inovasi strategis dari periode ke periode.

Bagian pertama temuan berfokus pada analisis dampak Alokasi Dana Desa terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi lokal melalui intervensi sektor infrastruktur dasar. Hasil wawancara mendalam dengan kepala desa dan sekretaris desa mengonfirmasi bahwa arah kebijakan penganggaran desa masih didominasi secara mutlak oleh agenda semenisasi jalan desa, pembangunan jembatan penghubung antardusun, pembuatan saluran irigasi pertanian sekunder, serta pemugaran gedung kantor desa. Pilihan prioritas ini diambil karena pembangunan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

infrastruktur fisik memberikan dampak visual instan yang mudah diukur volumenya oleh tim verifikator kecamatan, sekaligus memberikan kepuasan psikologis jangka pendek bagi masyarakat yang mendambakan modernitas fasilitas lingkungan. Berdasarkan hasil observasi langsung pada sektor pertanian, pembangunan jalan usaha tani terbukti memberikan kontribusi nyata dalam memotong rantai distribusi hasil panen komoditas lokal seperti padi dan hortikultura. Sebelum adanya perbaikan jalan, para petani harus mengeluarkan biaya transportasi ojek sawah yang sangat mahal untuk membawa komoditas mereka ke jalan utama, namun pasca-semenisasi, kendaraan roda empat dapat langsung masuk ke area persawahan sehingga menekan ongkos angkut komoditas secara signifikan.

Akselerasi perputaran barang publik tersebut berdampak positif pada stabilitas harga jual komoditas di tingkat petani karena risiko kerusakan barang akibat keterlambatan mobilitas dapat diminimalisasi secara optimal. Stimulus infrastruktur ini juga memicu tumbuhnya unit-unit usaha jasa transportasi lokal dan membuka keterisolasian wilayah dusun yang paling terpencil dari pusat aktivitas pasar kecamatan. Di sisi lain, temuan riset kualitatif ini juga mengidentifikasi kontribusi dana desa dalam mengaktifkan kelembagaan ekonomi kolektif lokal yang mewujud dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Pihak pemerintah desa telah mengalokasikan penyertaan modal awal yang bersumber dari anggaran desa untuk mendanai unit usaha toko sarana produksi pertanian, jasa penyewaan alat berat pertanian, serta unit pengelolaan air minum komunal. Keberadaan unit usaha ini secara langsung membantu memenuhi kebutuhan input produksi para petani dengan harga yang relatif lebih terjangkau dibandingkan harga pasar komersial, yang pada gilirannya mendorong penguatan ekosistem perekonomian domestik desa menjadi lebih mandiri dan dinamis.

Namun demikian, kedalaman analisis kualitatif menemukan fakta bahwa kontribusi positif pada sektor pertumbuhan ekonomi makro desa tersebut belum berbanding lurus dengan peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat secara substantif dan merata pada tingkat rumah tangga miskin. Fenomena kesenjangan dampak kebijakan ini disebabkan oleh minimnya porsi alokasi dana desa yang diarahkan khusus untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis peningkatan keterampilan usaha, bantuan permodalan bergulir tanpa agunan, serta hilirisasi produk pascapanen. Pemerintah desa cenderung enggan mendanai program pelatihan kewirausahaan konvensional karena hasilnya dinilai abstrak, lambat dievaluasi, dan memiliki risiko pertanggungjawaban administratif yang rumit apabila terjadi kegagalan usaha di tingkat penerima manfaat. Akibatnya, kelompok marjinal seperti buruh tani, perempuan kepala keluarga, dan pemuda pengangguran hanya menempati posisi sebagai penonton atau kuli harian lepas pada proyek pembangunan fisik desa tanpa adanya peningkatan kapasitas ekonomi yang bersifat struktural dan jangka panjang.

Untuk memberikan visualisasi data yang komprehensif mengenai kontradiksi dampak kebijakan tersebut, pola hubungan intervensi anggaran dengan realitas capaian di lapangan dirangkum dalam tabel klasifikasi hasil evaluasi kualitatif berikut ini.

Tabel 2. Matriks Temuan Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa Terhadap Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Dimensi Analisis	Realisasi Capaian Lapangan	Catatan Kritis Hasil Analisis Kualitatif
Pertumbuhan Ekonomi *(Sektor Infrastruktur)*	Pembangunan jalan usaha tani dan irigasi selesai seratus persen dengan kualitas fisik memadai.	Berhasil memotong biaya logistik komoditas pertanian, namun menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cenderung semu.
Pertumbuhan Ekonomi *(Sektor Usaha Mikro)*	Penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa terealisasi setiap tahun anggaran secara konsisten.	Unit usaha masih terbatas pada sektor jasa sewa konvensional dan belum mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam skala luas.
Kesejahteraan Masyarakat *(Aspek Pendapatan)*	Penciptaan lapangan kerja instan yang bersifat padat karya tunai pada setiap proyek fisik.	Pendapatan bersifat temporer selama proyek berlangsung dan tidak mengubah status ekonomi struktural warga miskin.
Kesejahteraan Masyarakat *(Kapasitas SDM)*	Realisasi program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi berada di bawah sepuluh persen.	Rendahnya kapasitas manajerial masyarakat membuat inovasi usaha mikro macet akibat kurangnya pendampingan berkala.

Sumber: Data Primer Hasil Olahan Wawancara, Observasi, dan Triangulasi Riset (2026)

Matriks temuan yang tersaji dalam Tabel 2 secara gamblang membongkar struktur kontradiksi kebijakan di mana keberhasilan pencapaian kuantitatif fisik pada dimensi pertumbuhan infrastruktur tidak secara otomatis mentransformasi dimensi kesejahteraan non-fisik warga desa. Informan dari kalangan tokoh masyarakat dan pelaku usaha mikro menyatakan bahwa program padat karya tunai yang digaungkan oleh pemerintah desa hanya mampu memberikan tambahan pendapatan instan selama beberapa minggu saja, yaitu ketika proyek pembangunan jalan atau saluran irigasi sedang dikerjakan secara fisik di lapangan. Setelah proyek tersebut selesai diserahterimakan, warga miskin kembali kehilangan sumber mata pencaharian utamanya dan terpaksa kembali menghadapi ketidakpastian ekonomi rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa dana desa belum mampu menciptakan lapangan kerja

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

mandiri yang permanen akibat lemahnya visi jangka panjang aparatur desa dalam merancang diversifikasi ekonomi perdesaan yang inklusif.

Kondisi tidak optimalnya pencapaian tingkat kesejahteraan substantif tersebut diperparah oleh rendahnya keterlibatan aktif masyarakat dalam tahapan perencanaan dan pengawasan alokasi anggaran desa. Hasil wawancara dengan para informan kunci mengungkapkan bahwa forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun seringkali hanya berjalan sebagai formalitas seremonial untuk menggugurkan kewajiban regulasi di atas kertas. Agenda penentuan prioritas anggaran didominasi oleh kelompok elite desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan segelintir tokoh formal, sehingga usulan-usulan masyarakat bawah mengenai penguatan modal usaha mikro atau pengadaan fasilitas pelatihan konveksi dan perbengkelan pemuda selalu tereliminasi dengan alasan keterbatasan pagu anggaran dana. Ketimpangan relasi kuasa di tingkat lokal ini memicu asimetri informasi yang masif, di mana warga desa pada umumnya tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah anggaran yang dikelola oleh desa mereka dan bagaimana rincian pemanfaatannya dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sah.

Faktor penghambat lain yang ditemukan dalam riset kualitatif ini adalah rendahnya kapasitas tata kelola administrasi dan kompetensi manajerial keuangan dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri. Keterbatasan latar belakang pendidikan serta minimnya pelatihan teknis kedinasan yang intensif membuat para perangkat desa mengalami kegagapan administratif yang kronis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang rumit dan dinamis. Ketakutan yang berlebihan terhadap sanksi hukum dari aparat penegak hukum dan auditor eksternal apabila terjadi kesalahan administrasi membuat para kepala desa memilih jalur aman dalam membelanjakan dana desa. Jalur aman yang dimaksud adalah dengan mengulang-ulang proyek infrastruktur fisik standar yang sudah memiliki rumus perhitungan volume baku dan kuitansi pembelian material yang jelas, daripada mengambil risiko merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dinamis, padat konflik sosial, namun memiliki akuntansi pertanggungjawaban yang kompleks dan rawan dipersalahkan oleh sistem audit formal kementerian.

Lebih lanjut, analisis data kualitatif juga menguak adanya intervensi politik lokal dan relasi patronase yang kuat dalam penentuan lokasi pengerjaan proyek fisik yang didanai oleh Alokasi Dana Desa. Dusun atau wilayah pemukiman warga yang menjadi basis massa kemenangan kepala desa pada saat pemilihan kepala desa cenderung mendapatkan porsi pembangunan infrastruktur yang jauh lebih besar dan berkualitas baik, sementara wilayah dusun yang kalah dalam kontestasi politik lokal tersebut seringkali terabaikan dan tertinggal dalam perbaikan fasilitas publiknya. Pola diskriminasi alokasi anggaran berbasis politik balas budi ini mencederai prinsip keadilan sosial dan menciptakan kecemburuan sosial yang mendalam di antara warga antardusun. Akibatnya, kohesi sosial dan budaya gotong royong yang menjadi modal sosial utama masyarakat pedesaan mengalami degradasi secara perlahan, yang pada gilirannya menghambat efektivitas pelaksanaan pembangunan itu sendiri karena rendahnya rasa kepemilikan warga terhadap aset infrastruktur yang telah dibangun pemerintah desa.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Temuan observasi lapangan juga menunjukkan adanya isu keberlanjutan dan pemeliharaan aset fisik pasca-proyek selesai dikerjakan oleh tim pelaksana kegiatan desa. Banyak infrastruktur jalan desa dan saluran irigasi yang baru dibangun berumur kurang dari dua tahun sudah mengalami kerusakan fisik yang cukup parah, seperti keretakan semen dan amblasnya fondasi jalan. Kerusakan dini ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu rendahnya kualitas material bangunan akibat adanya praktik pemotongan anggaran secara tidak resmi untuk operasional birokrasi, serta ketiadaan alokasi dana pemeliharaan rutin dalam dokumen anggaran desa. Pemerintah desa berasumsi bahwa tugas mereka hanya membangun secara fisik, sedangkan pemeliharaan aset sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran swadaya masyarakat tanpa adanya regulasi tingkat desa yang mengikat. Hal ini memicu pemborosan keuangan negara yang luar biasa karena desa harus terus menganggarkan dana pemulihan untuk objek infrastruktur yang sama secara berulang-ulang pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Meskipun diwarnai oleh berbagai kendala tata kelola dan distorsi alokasi yang cukup mendasar, hasil penelitian kualitatif ini tetap menemukan beberapa titik keberhasilan yang patut diapresiasi dari kebijakan Alokasi Dana Desa, khususnya pada pemenuhan aspek kesejahteraan sosial dasar masyarakat. Intervensi dana desa pada sektor kesehatan melalui pembiayaan operasional kegiatan posyandu secara berkala, pemberian makanan tambahan bagi balita guna menekan angka stunting, serta penyediaan mobil siaga desa terbukti sangat efektif dalam menurunkan tingkat morbiditas warga di wilayah pelosok. Pada sektor pendidikan dasar non-formal, dana desa juga berkontribusi nyata dalam memberikan insentif honorarium bagi para guru pendidikan anak usia dini dan guru mengaji tradisional yang selama ini luput dari perhatian anggaran pemerintah desa. Keberhasilan pada dimensi sosial dasar ini menunjukkan bahwa apabila dikelola dengan tingkat transparansi yang tinggi dan komitmen kepemimpinan yang bersih, instrumen fiskal dana desa memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk mengentaskan kemiskinan multidimensi di perdesaan secara bertahap.

Secara keseluruhan, hasil analisis interaktif dalam penelitian kualitatif ini menyimpulkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa telah berhasil meletakkan fondasi awal yang kokoh bagi percepatan pertumbuhan ekonomi tingkat desa melalui pemenuhan barang publik berupa konektivitas infrastruktur transportasi fisik dasar. Namun demikian, tujuan filosofis utama dari kebijakan desentralisasi fiskal tersebut, yaitu mewujudkan transformasi kesejahteraan masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berkeadilan sosial, masih jauh dari kata optimal akibat terperangkap dalam jebakan kosmetik pembangunan fisik, rendahnya kapasitas manajerial birokrasi lokal, minimnya ruang partisipasi warga, serta intervensi kepentingan politik elite desa. Optimalisasi pemanfaatan anggaran desa di masa depan menuntut adanya perubahan radikal dalam formulasi perencanaan anggaran melalui reorientasi fokus dari pembangunan semenisasi fisik menuju penguatan kapasitas ekonomi produktif berbasis potensi keunggulan lokal, disertai dengan pendampingan tata kelola keuangan yang ketat, transparan, dan akuntabel guna memastikan setiap rupiah dana desa memberikan dampak nilai tambah yang hakiki bagi kemakmuran seluruh lapisan warga masyarakat desa secara merata.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PEMBAHASAN

Interpretasi kritis terhadap temuan empiris menunjukkan adanya fenomena diskoneksi struktural antara capaian makro pembangunan fisik dengan perwujudan kesejahteraan mikro masyarakat desa. Pilihan rasional pemerintah desa yang mengutamakan alokasi anggaran pada sektor infrastruktur transportasi mencerminkan manifestasi dari bias fisik dalam kebijakan publik tingkat lokal. Pembangunan yang bertumpu pada semenisasi jalan dan irigasi memang memberikan dampak akselerasi ekonomi sektoral jangka pendek melalui penurunan biaya logistik dan peningkatan konektivitas pasar, namun gagal menyentuh pemecahan masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh stimulus fiskal tidak secara otomatis mendistribusikan tetesan kesejahteraan ke lapisan terbawah apabila tidak diimbangi oleh kebijakan investasi modal manusia yang terarah melalui pemberdayaan kapasitas kelompok rentan.

Distorsi prioritas anggaran ini berakar kuat pada lingkaran kecemasan administratif aparatur pemerintahan desa yang mengalami keterbatasan kompetensi tata kelola keuangan modern. Birokrasi desa terjebak dalam perangkap kepatuhan formalitas demi menghindari delik hukum dari aparat pengawas internal maupun eksternal. Ketakutan tersebut mendorong pembentukan perilaku mencari aman dengan mengulang program pembangunan fisik konvensional secara monoton, karena memiliki instrumen pengukuran volume serta kuitansi material yang konkret untuk diaudit. Akibatnya, esensi desentralisasi fiskal yang semestinya mendorong diskresi kebijakan berbasis inovasi potensi lokal menjadi mandul dan tereduksi menjadi sekadar perpanjangan tangan administrasi negara yang bersifat mekanistik dan tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat bawah.

Secara teoretis, kegagalan pencapaian kesejahteraan yang inklusif ini juga diperparah oleh kuatnya asimetri informasi dan hegemoni elite lokal dalam ruang musyawarah perencanaan pembangunan desa. Forum publik yang dirancang sebagai instrumen demokrasi partisipatif dan transparansi anggaran terkooptasi oleh kepentingan politik patronase elite desa, sehingga suara kelompok marjinal tereliminasi sejak tahap awal perencanaan. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya rasa kepemilikan masyarakat terhadap infrastruktur publik yang dibangun, yang tecermin dari pengabaian pemeliharaan aset pasca-proyek selesai. Oleh karena itu, efektivitas Alokasi Dana Desa tidak lagi sekadar urusan optimalisasi penyerapan kuantitatif anggaran, melainkan pembenahan radikal pada dimensi tata pamong desa yang menuntut adanya demokratisasi ruang fiskal, peningkatan kompetensi manajerial perangkat desa, serta reorientasi kebijakan yang menempatkan penguatan kapasitas ekonomi produktif warga sebagai arus utama pembangunan perdesaan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan rangkaian analisis data kualitatif dan interpretasi kritis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa secara substantif baru berhasil meletakkan fondasi pertumbuhan ekonomi sektoral pada dimensi makro-infrastruktur, namun belum mampu menembus transformasi kesejahteraan sosial secara inklusif dan merata pada tingkat rumah tangga miskin. Intervensi anggaran desa yang sangat dominan pada proyek-

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

proyek semenisasi konektivitas transportasi terbukti efektif memotong rantai logistik pertanian dan menghidupkan aktivitas pasar domestik perdesaan, tetapi keberhasilan visual-kuantitatif tersebut menyisakan kontradiksi struktural berupa kegagalan penyelesaian masalah kemiskinan yang multidimensional. Pendapatan tambahan yang diterima masyarakat melalui skema padat karya tunai dalam pengerjaan proyek fisik di lapangan dinilai sangat rapuh dan bersifat temporer, sehingga tidak memiliki daya ungkit yang cukup kuat untuk mengubah status sosial-ekonomi masyarakat marjinal dalam jangka panjang.

Ketidakoptimalan dampak kebijakan desentralisasi fiskal ini bersumber dari adanya bias kosmetik pembangunan fisik yang dipelihara secara sadar oleh lingkaran birokrasi pemerintahan desa akibat rendahnya kompetensi manajerial keuangan serta tingginya kecemasan administratif terhadap risiko sanksi hukum dari sistem audit formal eksternal. Perilaku mencari aman dari aparatur lokal ini menyebabkan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inovatif berbasis potensi lokal tereliminasi secara sistematis dan digantikan oleh pengulangan proyek fisik konvensional secara monoton karena dinilai memiliki rumusan kalkulasi volume belanja serta pertanggungjawaban kuitansi material yang konkret. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya asimetri informasi, ketimpangan relasi kuasa, serta hegemoni elite desa yang mengkooptasi ruang musyawarah perencanaan pembangunan, sehingga forum yang semestinya menjadi instrumen demokrasi partisipatif hanya berjalan sebatas formalitas seremonial tanpa keterlibatan substantif dari aspirasi warga lapisan bawah.

Selain itu, riset ini juga menyimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan dana desa terdistorsi oleh intervensi politik patronase lokal kepala desa yang melahirkan ketimpangan distribusi anggaran antardusun, yang pada gilirannya mendegradasi modal sosial gotong royong warga serta menciptakan ancaman pemborosan anggaran akibat ketiadaan biaya pemeliharaan rutin terhadap kualitas infrastruktur baru yang cepat mengalami kerusakan. Pembenahan masa depan menuntut adanya perubahan paradigma tata kelola keuangan desa secara radikal, dari semula bertumpu pada orientasi penyerapan anggaran secara kuantitatif menuju pada maksimalisasi dampak nilai tambah yang berkelanjutan melalui perluasan porsi pendanaan hilirisasi produk lokal, penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa, serta demokratisasi ruang fiskal yang transparan dan akuntabel demi menjamin perwujudan kemakmuran yang hakiki bagi seluruh masyarakat perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.

Kuncoro, M. (2014). *Indikator ekonomi*. UPP STIM YKPN.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.

Saraswati, R., & Devy, S. (2021). *Desentralisasi fiskal dan tata kelola keuangan daerah*. Pustaka Pelajar.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the weak: Everyday forms of peasant resistance*. Yale University Press. *(Rujukan teoretis relasi elite-massa di perdesaan)*.

Shah, A. (Ed.). (2007). *Local budgeting*. The World Bank.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson. *(Rujukan teoretis teori pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan)*.

Widjaja, H. A. W. (2018). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Rajawali Pers.

World Bank. (2022). *Indonesia economic quarterly: Investing in people*. World Bank Group

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.